

## Pemilu 2024, Bisnis Percetakan di Bekasi Banjir Orderan

BEKASI (IM) - Momen Pemilu 2024 menjadi berkah bagi pengusaha percetakan di Bekasi yang memproduksi pesanan banner dan baliho untuk keperluan kampanye.

Leader desain percetakan Purwodigital Bekasi, Edo Ramadhan menuturkan, tahun ini ada peningkatan orderan untuk Pemilu 2024.

"Untuk percetakan di sini khususnya daerah Bekasi dan sekitarnya, tepatnya di Purwodigital yang saya kerjakan. Ya, alhamdulillah ada peningkatan cuma enggak kayak tahun 2019 sih," ucap Edo saat ditemui di toko percetakannya, Kota Bekasi, Jumat (12/1).

Meski begitu, permintaan pada 2023 meningkat lebih signifikan dibandingkan tahun 2020-2022 saat pandemi Covid-19 melanda. "Tapi ya masih ramai juga sih alhamdulillah. Ada pe-

ningkatan lah dari tahun pandemi kemarin 2020 sampai 2022," ucap dia.

Kata Edo, pesanan untuk Pemilu 2024 sudah mulai masuk sejak Oktober 2023. Pada Januari 2024, pesanan terus meningkat.

"Sudah mulai dari bulan Oktober, itu sudah mulai ramai. Januari sekarang itu lumayan, enggak tahu kalau Februari ya, soalnya pemilu sudah mulai," kata dia.

Edo mengatakan, jenis orderan paling banyak ada di banner, spanduk kecil, kaus partai dan kalender. Peningkatan pesanan mencapai 30 persen.

"Ada (peningkatan) 20-30 persen itu ada. Yang kerja paling orang sini doang sekitar 25 karyawan," imbuh dia.

Edo enggan menyebutkan omzet yang diraupnya. Ia menaksir, dalam sebulan, seratusan juta bisa didapatkan. ● yan

### ANTISIPASI CUACA EKSTREM

## Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran Bencana Alam

BEKASI (IM) - Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan terbitkan surat edaran bencana alam atau Hidrometeorologi antisipasi cuaca ekstrem selama bulan Januari hingga Maret 2024.

Hal ini tercantum Surat Edaran No. BC.03.01/SE-04/BPBD.

"Mengintruksikan kepada kepala perangkat daerah terkait, camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Bekasi, untuk mengambil langkah antisipasi, dengan mengaktifkan posko-posko siaga bencana di wilayah masing-masing," ucap Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melalui website Bekasi kab.go.id, Jum'at (12/1).

Para camat, lurah, dan kepala desa nantinya melakukan koordinasi ke dinas terkait hingga organisasi masyarakat yang membidangi kebencanaan.

Kemudian warga diharapkan untuk selalu memperhatikan informasi cuaca,

melalui media elektronik maupun media sosial.

Perangkat pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat meningkatkan mitigasi.

"Seperti membersihkan saluran air, normalisasi sungai, mempersiapkan jalur evakuasi, dan mempersiapkan tempat pengungsian yang aman bagi warga yang terdampak bencana," jelasnya.

Surat edaran yang diterbitkan pada 10 Januari 2024 itu, Dani Ramdan meminta seluruh jajaran mempersiapkan sarana prasarana sumber daya untuk menghadapi bencana alam.

Diketahui penerbitan surat edaran ini menindaklanjuti surat edaran Pj Gubernur Jawa Barat perihal antisipasi dampak cuaca ekstrem awal tahun 2024, dan tindak lanjut surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). ● yan

## Razia Parkir Liar, Puluhan Motor di Pasar Tanah Abang Diangkut Petugas

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat kembali melakukan penertiban parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang. Ratusan personel diterjunkan untuk menertibkan parkir liar tersebut.

"Kami menyisir untuk penertiban pada hari ini mulai dari kawasan Kebon Kacang hingga AURI Tanah Abang. Personel pada penertiban hari ini ada TNI, Polri, Satpol PP Jakpus dan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat," kata Koordinator Lapangan Penerbitan Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Pusat, WS Laoly kepada wartawan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

Laoly mengatakan, penertiban parkir liar ini dilakukan dari banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluh kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang. Penertiban ini menyasar bagi kendaraan roda yang memarkir motor sembarangan di bahu jalan.

"Dari hasil penertiban ini ada 30 kendaraan motor yang kami angkut karena parkir sembarangan. Tidak hanya di

bahu jalan, pihaknya juga menertibkan kendaraan roda dua yang parkir di trotoar," ujar Laoly.

Lebih lanjut, Laoly mengatakan bagi kendaraan yang parkir sembarangan akan diangkut dan dibawa ke Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat untuk tidak melakukan parkir di gedung dan tempat parkir yang tersedia di kawasan Pasar Tanah Abang.

Sementara itu, Kasie Pengendalian Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Hario Bagus menambahkan, selain parkir liar kerawanan kemacetan di kawasan Tanah Abang juga dipicu banyaknya aktifitas bongkar muat kendaraan logistik pada saat jam sibuk. Sebab, sudah ada aturan bahwa operasional bongkar muat bisa dilakukan setelah jam sibuk, mulai pukul 20.00 sampai 05.00.

"Kalau bisa juga proses bongkar muatnya di area parkir sendiri sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Tetap kita akan terus pantau agar tidak ada pelanggaran," kata Hario. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



### AKSI KAMISAN KE-801

Mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyampaikan orasi di depan peserta Aksi Kamisan ke-801 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/1). Aksi tersebut menghadirkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

### TERKAIT STIKER DI HALTE TRANSJAKARTA

## Anggota Dewan Duga Pemasangan Stiker Pj Heru Terkait Pilkada

Meski di TransJakarta tak ada aturan memasang foto pejabat, namun Anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye. "Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli mendukung adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.

"Kalau banyak menampilkan

kan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat (12/1).

Taufik menuturkannya pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman,

Indonesia Kuat" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya.

Lantaran, menurut dia, belum jadwal kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni dimulai 25 September hingga 23 November 2024.

Adapun, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan

partai peserta Pemilu.

Terlebih, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024. "Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.

Meski di TransJakarta tak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye. "Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.

Komis B DPRD DKI akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman.

Sebelumnya, Manajemen PT TransJakarta menyebutkan pemasangan stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai.

"Stiker sudah kami pasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut

pelaksanaan Pemilu 2024, ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Kamis (11/1).

### Bantah Tuduhan

Sementara itu, Sekreteraris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiyono membantah tuduhan bahwa Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan kampanye terselubung.

Sekda menuturkan, tidak ada makna ajakan untuk memilih dalam banner maupun stiker tersebut. "Itu ucapan selamat untuk pemilu. Itu imbauan. Bukan kampanye. Itu bukan mengarah pada pemilihan. Apa sih bahasanya? Pemilu damai. Kita menyapaikan kepada masyarakat," ungkap Joko ditemui di Balai Kota, Jumat (12/1).

Ia pun bersikap santai jika ada yang memandang negatif pemasangan imbauan itu. Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah memang akan diiringi oleh pro dan kontra dari masyarakat. Hal tersebut adalah hal yang wajar sehingga media luar ruang tersebut tidak perlu diturunkan. "Malahnya apa sih kok mesti dicopot. Tidak merusak kok," tegasnya. ● yan



FOTO: ANT

### YAMAHA LUNCURKAN LEXI LX 155

Produk terbaru Yamaha LEXI LX 155 resmi diluncurkan di Jakarta, Jumat (12/1). Yamaha LEXI LX 155 yang dilengkapi dengan mesin Blue Core 155 cc generasi terbaru yang memiliki tiga varian dan tiga warna.

## Pemkot Depok Buka Pendaftaran Magang Kerja di Jepang

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, membuka pendaftaran dan menyiapkan pelatihan kerja atau magang di Jepang bagi warga untuk menambah keterampilan kerja.

"Untuk anak-anak muda Kota Depok, ada peluang magang di Jepang tiga tahun, akan dididik dan dilatih bahasa Jepang secara gratis. Pendaftaran telah dibuka sejak 20 Desember 2023 hingga 28 Februari 2024," kata Wakil Wali Kota

Depok, Imam Budi Hartono di Depok, Jumat (12/1).

Pelatihan tersebut merupakan kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok dengan PT Japan Indonesian Economic Center (JIAEC).

Ia mengatakan pelatihan ini dapat diikuti masyarakat dengan usia maksimal 23 tahun. Serta merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/

sederajat.

Imam menjelaskan jika berhasil terpilih untuk magang di Jepang dapat memiliki gaji di atas Rp15 juta. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link <https://simpel.depok.go.id/Home/daftarPelatihan/PLT37>, tersedia 100 kuota untuk diberangkatkan ke Jepang pada tahun 2024.

Imam berharap dengan adanya pelatihan tersebut bisa memberikan peluang kepada warga Depok untuk semakin berkisah di luar negeri. ● yan

## Pemprov DKI Diminta Tak Ragu Copot Alat Peraga Kampanye yang Langgar Aturan

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk tidak ragu mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah jelas melanggar aturan. "Itu diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan juga sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda)," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, Jumat (12/1).

Menurut Benny, sudah terdapat aturan mengenai lokasi yang boleh dan tidak dipasang APK pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia mencontohkan baliho, spanduk atau bendera partai yang terpasang di pembatas jalur sepeda. Lokasi ini jelas harus steril dari atribut kampanye. "Selain itu partai politik sebagai peserta pemilu juga berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang melanggar," kata Benny. Seharusnya, kata Benny, partai politik maupun peserta Pemilu memberikan pendidikan politik yang benar.

Salah satunya bisa dengan memasang atribut kampanye di lokasi yang diperbolehkan. "Oleh karena itu, Bawaslu DKI mengimbau kepada partai politik agar patuh, tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang,"

ungkap Benny.

Merujuk Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, diatur bahwa APK Pemilu tidak dipasang di tempat umum, yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah "Dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum," seperti dikutip dari beleid tersebut.

Selain itu, Peraturan KPU DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2023 juga mengatur larangan pemasangan APK di pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, stasiun, pelabuhan, *flyover* dan *underpass*.

Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sejak hari pertama kampanye, APK mulai dipasang. Baliho, spanduk, bendera partai, dan pamflet menjamur ke seluruh penjuru ibu kota. Permasalahan muncul ketika APK tersebut dipasang di fasilitas umum milik Pemprov DKI. Salah satunya terlihat di sepanjang jalan Gunung Sahari hingga Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). ● yan

### PENGUMUMAN

Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Direksi PT Citra Indopertwi Lestari, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Plaza Kebon Jeruk Blok C3-4, Jl. Raya Perjuangan, Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Perseroan), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham dalam Perseroan (Rencana Pengambilalihan). Rencana Pengambilalihan akan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku termasuk persetujuan perundang-undangan yang diperlukan.

Setiap keberatan dari kreditur Perseroan atau pihak ketiga terhadap Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis, bersama dengan informasi terkait alasan keberatan dan dokumen pendukung, dalam waktu empat belas (14) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT Citra Indopertwi Lestari  
Plaza Kebon Jeruk Blok C3-4, Jl. Raya Perjuangan, Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
U.p.: Direksi  
Jakarta, 13 Januari 2024  
Untuk dan atas nama  
PT Citra Indopertwi Lestari  
Direksi

### PENGUMUMAN

Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Direksi PT Raya Fortuna Energi, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Puri Imperium Office Plaza LG-12, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Perseroan), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham dalam Perseroan (Rencana Pengambilalihan). Rencana Pengambilalihan akan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku termasuk persetujuan perundang-undangan yang diperlukan.

Setiap keberatan dari kreditur Perseroan atau pihak ketiga terhadap Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis, bersama dengan informasi terkait alasan keberatan dan dokumen pendukung, dalam waktu empat belas (14) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT Raya Fortuna Energi  
Puri Imperium Office Plaza LG-12, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
U.p.: Direksi  
Jakarta, 13 Januari 2024  
Untuk dan atas nama  
PT Raya Fortuna Energi  
Direksi

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT CNEM INTERNATIONAL INDONESIA, tertanggal 12 Januari 2024, Nomor 13, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Ariyanti, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selubung dengan:

- Rencana Pembubaran dan Likuidasi Perseroan;
- Menunjuk **ANDRIK APRILYANTO SETIAWAN, S.E.Ak., M.Ak., CLU** dan **REINALDO REGINAL RUSLI** sebagai Likuidator Perseroan

Bagi Para Pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat menghubungi likuidator selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke alamat Jalan Kesehatan 1 No.25 Petjo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Telepon: 081934566000. Jakarta, 12 Januari 2024  
Ttd.  
Likuidator